



Kesenjangan Digital dan Dampaknya terhadap Perkembangan UMKM sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Alvy Syahratin¹, Sarpini²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jl. A.
Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah 53126

*Penulis Korespondensi: 244110201267@mhs.uinsaizu.ac.id, sarpini@uinsaizu.ac.id

Abstract. *Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are a pillar of the people's economy (ekonomi kerakyatan) in Indonesia, yet their ability to benefit from digital technology remains uneven. This article aims to identify the forms of the digital divide among MSMEs, analyze its impact on MSME development, and describe strategies to narrow it. The study uses a descriptive qualitative literature review of scientific journal articles and relevant publications that were selected, read, and synthesized thematically. The findings show that the digital divide is multidimensional and takes four forms: material, motivational, skills, and usage access. Skills and productive usage matter most for business productivity, whereas material and motivational access alone have only a weak effect. The divide reduces operational efficiency, confines MSMEs to narrow markets, hampers their adaptation to changing consumer behavior, and limits strategic partnership opportunities. Strategies to narrow it include structured digital literacy training and participatory assistance using low-cost technology, open innovation through collaboration with e-commerce and fintech platforms, and government support through equitable digital infrastructure and protective regulation. These findings imply that closing the digital divide requires cross-sector synergy so that MSMEs can sustain their competitiveness and resilience as pillars of the people's economy.*

Keywords: *digital divide; digital literacy; digital transformation; MSMEs; people's economy*

Abstrak. UMKM merupakan pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia, tetapi kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital masih timpang. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk kesenjangan digital pada UMKM, menganalisis dampaknya terhadap perkembangan UMKM, serta merumuskan strategi untuk menguranginya. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap artikel jurnal ilmiah dan publikasi relevan yang dipilih, dibaca, dan disintesis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan digital bersifat multidimensi dan terbagi ke dalam empat bentuk, yaitu akses materi, motivasi, keterampilan, dan penggunaan. Akses keterampilan dan penggunaan yang produktif paling menentukan produktivitas usaha, sedangkan akses materi dan motivasi saja berpengaruh lemah. Kesenjangan ini menurunkan efisiensi operasional, membatasi UMKM pada pasar yang sempit, menyulitkan adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen, dan mengurangi peluang kemitraan strategis. Strategi yang dapat ditempuh meliputi pelatihan literasi digital terstruktur dan pendampingan partisipatif berbasis teknologi berbiaya rendah, inovasi terbuka melalui kolaborasi dengan platform e-commerce dan fintech, serta dukungan pemerintah berupa pemerataan infrastruktur digital dan regulasi yang melindungi. Implikasinya, penutupan kesenjangan digital memerlukan sinergi lintas sektor agar UMKM mampu menjaga daya saing dan ketahanan usahanya sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Kata kunci: ekonomi kerakyatan; kesenjangan digital; literasi digital; transformasi digital; UMKM

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM menjadi penggerak sektor riil yang berperan menyerap

tenaga kerja, mendistribusikan pendapatan, dan menekan angka kemiskinan, serta memiliki daya tahan yang tinggi terhadap gejolak ekonomi global (Syafiqah et al., 2025). Dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang dibangun di atas nilai kemandirian, keadilan, dan gotong royong, UMKM bersama koperasi menjadi tulang punggung yang memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat dari tingkat daerah hingga nasional (Syafiqah et al., 2025).

Perkembangan ekonomi digital menuntut UMKM untuk beradaptasi. Pemanfaatan platform *e-commerce*, media sosial, dan teknologi digital lainnya terbukti mampu menekan biaya operasional, mempercepat transaksi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar hingga melampaui batas geografis (Hutabara et al., 2026; Suroto, 2023). Dengan demikian, digitalisasi dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan daya saing UMKM secara berkelanjutan. Akan tetapi, peluang tersebut belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha masih terhambat oleh rendahnya literasi digital serta terbatasnya modal, infrastruktur, dan pembiayaan, sehingga muncul kesenjangan digital (*digital divide*) di antara UMKM (Hutabarat et al., 2026; Saragih et al., 2024). UMKM yang tertinggal berisiko kesulitan menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen modern, kehilangan daya saing, dan tertinggal dalam inovasi produk maupun model bisnis, yang pada akhirnya mengancam ketahanan usahanya (Saragih et al., 2024).

Sejumlah penelitian telah mengkaji persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Suroto (2023) meneliti dampak digitalisasi terhadap UMKM di Kota Jambi dan menemukan bahwa pelaku usaha yang masih mengandalkan pencatatan manual kesulitan memantau stok barang dan rentan terhadap kesalahan hitung. Hutabarat et al., (2026) melalui studi literatur menegaskan bahwa kesenjangan digital mengurung UMKM pada pasar yang sempit. Suarni et al., (2024) menunjukkan bahwa pendampingan partisipatif berbasis teknologi berbiaya rendah membantu pelaku usaha menguasai teknologi tanpa investasi perangkat keras yang mahal, sedangkan Sitompul et al., (2025) menekankan pentingnya kolaborasi dengan platform *e-commerce* dan *fintech* serta dukungan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan regulasi.

Meskipun demikian, pembahasan tentang bentuk kesenjangan digital, dampaknya terhadap perkembangan UMKM, dan strategi penanggulangannya masih tersebar pada

berbagai studi dengan konteks wilayah dan fokus yang berbeda. Sintesis yang menghubungkan ketiganya dalam bingkai UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia masih perlu diperkuat. Di sinilah letak urgensi dan kebaruan kajian ini, yaitu menyajikan gambaran yang utuh dan terpadu dari hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai dasar bagi pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain dalam menyusun langkah yang tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kesenjangan digital pada UMKM, menganalisis dampaknya terhadap perkembangan UMKM, dan merumuskan strategi untuk mengurangi kesenjangan digital tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

1. UMKM sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah konsep perekonomian yang dibangun di atas nilai-nilai persaudaraan, kemandirian, serta keadilan, dengan menempatkan masyarakat luas sebagai aktor sentral penggerak kegiatan ekonomi. Pada sistem yang mengedepankan semangat gotong royong dan asas kekeluargaan ini, UMKM bersama dengan Koperasi menduduki posisi yang sangat vital sebagai tulang punggung utamanya. Koperasi hadir sebagai wadah ekonomi kolektif yang menstimulasi keterlibatan masyarakat secara bersama-sama, memfasilitasi kebutuhan modal, dan menjamin pembagian hasil usaha secara merata. Di sisi lain, UMKM bertindak sebagai dinamo utama di sektor riil yang memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak ekonomi global, serta berperan krusial dalam menyerap tenaga kerja, mendistribusikan pendapatan, dan menekan angka kemiskinan. Kolaborasi yang erat antara UMKM dan Koperasi pada akhirnya akan membentuk suatu ekosistem perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga mampu memperkuat kemandirian serta daya tahan ekonomi masyarakat mulai dari tingkat daerah hingga nasional (Syafiqah et al., 2025).

2. Digitalisasi UMKM,

Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan strategi krusial yang memungkinkan pelaku usaha untuk beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan di era ekonomi digital. Proses transformasi digital ini tidak sekadar berarti memiliki eksistensi di dunia maya, melainkan melibatkan

integrasi yang komprehensif dari berbagai teknologi informasi seperti platform e-commerce, media sosial, financial technology (fintech), sistem pembayaran digital (QRIS), dan komputasi awan (cloud computing) ke dalam seluruh lini operasional bisnis. Dalam tinjauan manajemen strategis, adopsi teknologi ini memberikan manfaat teoretis yang besar bagi UMKM, yaitu perluasan jangkauan pasar yang mampu meruntuhkan batasan geografis, peningkatan efisiensi operasional melalui pencatatan keuangan dan inventaris secara real-time, serta kemampuan memanfaatkan data analitik untuk membaca tren pasar dan perilaku konsumen secara lebih akurat. Meskipun digitalisasi menjanjikan penciptaan nilai tambah, kajian teoretis juga menggarisbawahi bahwa laju adopsinya sering kali terhambat oleh berbagai tantangan struktural yang saling berkaitan. Faktor-faktor penghambat utama tersebut meliputi kesenjangan literasi digital di kalangan pelaku usaha, keterbatasan modal untuk menanggung biaya investasi teknologi, serta belum meratanya infrastruktur digital dasar seperti jaringan internet. Oleh karena itu, keberhasilan dan keberlanjutan transformasi digital UMKM tidak dapat dicapai secara individual, melainkan sangat bergantung pada terbentuknya ekosistem yang kolaboratif. Hal ini menuntut adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, penyedia layanan digital, dan sektor swasta untuk merancang program pendampingan, memberikan subsidi atau insentif teknologi, serta membangun infrastruktur yang inklusif. (Morisson & Fikri, 2025).

3. kesenjangan digital (digital divide)

kesenjangan digital (digital divide) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kondisi ketimpangan kapabilitas antara pelaku usaha dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital untuk keberlangsungan bisnis mereka. Dalam kajian literatur, kesenjangan ini tidak sebatas persoalan teknis ketersediaan perangkat keras atau akses internet semata, melainkan bermuara pada akar masalah yang lebih kompleks, yakni rendahnya tingkat literasi digital. Pelaku UMKM sering kali belum sepenuhnya memahami potensi dan cara optimal dalam memanfaatkan instrumen digital (seperti platform e-commerce, media sosial, maupun analitik data) untuk mengefisienkan manajemen operasional, layanan pelanggan, dan strategi pemasaran. Faktor struktural seperti terbatasnya modal usaha dan kurang meratanya akses terhadap program edukasi maupun pelatihan yang relevan semakin memperparah kondisi ini. Akibatnya, UMKM

yang terjebak dalam kesenjangan digital akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen modern, kehilangan daya saing, serta tertinggal dalam inovasi produk dan model bisnis, yang pada akhirnya mengancam resiliensi mereka di era ekonomi digital. Oleh karena itu, investasi penguatan literasi digital tidak hanya penting dalam jangka pendek untuk menekan inefisiensi, tetapi juga sangat krusial dalam jangka panjang demi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis UMKM (Saragih et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (studi kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menghimpun, membandingkan, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu mengenai kesenjangan digital pada UMKM, bukan menguji hipotesis atau mengumpulkan data lapangan.

Data penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah dan publikasi lain yang relevan dengan topik UMKM, ekonomi kerakyatan, digitalisasi, dan kesenjangan digital. Penelusuran dilakukan melalui mesin pencari dan basis data ilmiah seperti Google Scholar dan Garuda dengan kata kunci “kesenjangan digital UMKM”, “digitalisasi UMKM”, “literasi digital UMKM”, dan “ekonomi kerakyatan”, serta padanannya dalam bahasa Inggris, yaitu *digital divide* dan MSMEs.

Sumber dipilih berdasarkan kriteria berikut: membahas UMKM di Indonesia, relevan dengan bentuk, dampak, atau strategi mengatasi kesenjangan digital, diterbitkan dalam kurung waktu 2023 sampai 2026, dan dapat ditelusuri identitas serta sumber publikasinya. Artikel yang tidak sesuai dengan fokus penelitian atau tidak jelas sumbernya tidak disertakan dalam analisis.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik. Tahapannya meliputi membaca dan mencatat temuan utama setiap artikel, mengelompokkan temuan ke dalam tiga tema sesuai tujuan penelitian, yaitu bentuk kesenjangan digital, dampaknya terhadap perkembangan UMKM, dan strategi untuk mengurangi kesenjangan tersebut, kemudian membandingkan kesesuaian dan perbedaan antartemuan untuk ditarik kesimpulan. Keabsahan temuan dijaga dengan

membandingkan beberapa sumber dan hanya merujuk pada publikasi yang dapat ditelusuri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur disajikan dalam tiga tema sesuai tujuan penelitian, yaitu bentuk kesenjangan digital pada UMKM, dampaknya terhadap perkembangan UMKM, dan strategi untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Bentuk Kesenjangan Digital pada UMKM

Fenomena kesenjangan digital pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak sekadar persoalan tidak adanya perangkat keras, melainkan sebuah isu multidimensi yang diklasifikasikan menjadi empat aspek utama: akses materi, akses motivasi, akses keterampilan, dan akses penggunaan (Lukas & Hasudungan, 2024). Kesenjangan akses materi berkaitan dengan tidak meratanya fasilitas fisik TIK dan infrastruktur dasar penunjangnya, seperti komputer, ponsel cerdas, serta pasokan listrik (Lukas & Hasudungan, 2024). Di sisi lain, kesenjangan akses motivasi sangat bergantung pada faktor mental, psikologis, sosial, maupun budaya yang membentuk dorongan pelaku usaha untuk menerima teknologi baru tersebut (Lukas & Hasudungan, 2024). Selanjutnya, terdapat kesenjangan akses keterampilan yang menggambarkan rendahnya kapasitas literasi atau tingkat pendidikan sumber daya manusia dalam mengoperasikan alat maupun menyerap informasi digital (Lukas & Hasudungan, 2024). Terakhir, kesenjangan akses penggunaan menyoroti disparitas kemampuan dalam mendayagunakan teknologi tersebut untuk aktivitas yang menghasilkan nilai produktif (Lukas & Hasudungan, 2024).

Terkait dengan kinerja bisnis, penguasaan akses keterampilan oleh pelaku UMKM terbukti berkontribusi secara positif dan signifikan dalam memacu produktivitas usaha (Lukas & Hasudungan, 2024). Peningkatan kemampuan ini sangat berkorelasi dengan pola penggunaannya; pelaku UMKM yang memakai internet secara spesifik untuk kebutuhan operasional, seperti perbankan digital (e-banking) atau riset pasar terkait barang dan jasa, mencatatkan probabilitas pertumbuhan produktivitas yang paling tinggi (Lukas & Hasudungan, 2024). Sebaliknya, jika internet hanya digunakan untuk mengakses media sosial atau mencari hiburan, dampaknya tidak akan optimal dalam

menggenjot produktivitas (Lukas & Hasudungan, 2024). Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa kepemilikan perangkat fisik (akses materi) dan niat awal (akses motivasi) saja hanya memberi pengaruh yang minim terhadap keseluruhan produktivitas UMKM apabila tidak diiringi dengan keterampilan dan pemanfaatan yang tepat sasaran (Lukas & Hasudungan, 2024).

Kesenjangan keterampilan ini menjadi isu yang sangat sentral saat pelaku UMKM dihadapkan pada kewajiban mengurus legalitas usaha, khususnya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat sistem Online Single Submission (OSS) (Pramesty, 2024). Rendahnya literasi digital ini semakin diperburuk oleh minimnya motivasi akibat rasa tidak percaya terhadap platform digital pemerintah. Hal ini kerap dipicu oleh birokrasi online yang berbelit-belit, rentan mengalami kesalahan data, hingga status tahapan perizinan yang tidak transparan (Pramesty, 2024). Kendala psikologis semacam ini sering dialami oleh pelaku usaha dari Generasi X yang cenderung mengidap kecemasan terhadap teknologi atau technophobia (Pramesty, 2024). Sebagai imbasnya, banyak UMKM enggan mengurus izin secara mandiri dan lebih memilih menggunakan jasa pihak ketiga atau konsultan. Praktik ini tidak hanya memboroskan anggaran usaha, tetapi juga membuka celah risiko penyalahgunaan data rahasia bisnis (Pramesty, 2024). Keengganan ini turut dilanggengkan oleh anggapan yang salah kaprah bahwa legalitas perizinan belum bersifat mendesak, mengingat sebagian UMKM lebih mengutamakan kelancaran perputaran uang dan target keuntungan harian (Pramesty, 2024).

Guna mengatasi akar permasalahan kesenjangan digital yang sistemik ini, keterlibatan aktif generasi muda sebagai digital native sangatlah krusial, mengingat mereka memiliki kecakapan literasi digital, keluwesan beradaptasi, dan pemikiran yang terbuka terhadap inovasi (Pramesty, 2024). Generasi muda mampu mengambil peran sebagai fasilitator (digital enabler) yang turun tangan langsung mendampingi para pelaku UMKM secara teknis saat mengakses portal pendaftaran izin usaha (Pramesty, 2024). Bentuk pendampingan ini idealnya tidak sebatas pada bantuan instruksional, melainkan juga menyentuh aspek edukasi literasi hukum digital. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran pelaku UMKM bahwa izin legalitas bukanlah sekadar syarat formal dari pemerintah, melainkan tameng perlindungan hukum sekaligus garansi bagi kelestarian usaha di masa depan (Pramesty, 2024). Di samping intervensi dari generasi

muda, lemahnya dampak dari akses materi yang tidak merata juga menegaskan perlunya skema kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta (public-private partnerships) untuk memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi bagi segenap pelaku UMKM (Lukas & Hasudungan, 2024).

Dampaknya terhadap perkembangan UMKM

Berdasarkan penelitian Suroto (2023) mengenai dampak digitalisasi terhadap UMKM di Kota Jambi, kesenjangan digital terbukti menghambat pelaku usaha untuk mencapai efisiensi operasional yang optimal. Suroto menemukan bahwa UMKM yang masih mengandalkan pencatatan manual sering kali menghadapi kesulitan dalam memantau ketersediaan stok barang, membuang lebih banyak waktu, dan rentan terhadap kesalahan hitung atau selisih data. Sebaliknya, penggunaan perangkat lunak seperti mesin kasir bersistem barcode membuat tata kelola stok dan keuangan menjadi jauh lebih akurat dan terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan studi literatur yang dilakukan oleh Hutabarat, et al., (2026), yang menegaskan bahwa adopsi teknologi digital sangat krusial karena terbukti mampu mengurangi biaya operasional, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan produktivitas usaha secara keseluruhan. Lebih lanjut, Hutabarat, et al., (2026) memaparkan bahwa kesenjangan digital mengurung UMKM pada pasar yang sempit, padahal digitalisasi menawarkan peluang bagi UMKM untuk memperluas akses pasarnya hingga ke tingkat global tanpa memerlukan modal fisik yang besar. Hal ini diperkuat oleh temuan Suroto (2023) yang menyoroti pentingnya media sosial dan e-commerce untuk menjembatani hambatan geografis; pelaku UMKM yang sebelumnya hanya melayani pembeli lokal kini bisa menerima pesanan dari seluruh penjuru negeri. Ketertinggalan teknologi juga membuat UMKM gagal beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen modern yang kini lebih suka mencari barang, membandingkan harga, dan membaca ulasan daring (online review) melalui ponsel mereka sebelum memutuskan untuk berbelanja. Berbagai dampak negatif di atas tidak terlepas dari akar penyebab kesenjangan digital yang juga disoroti oleh kedua literatur tersebut. Hutabarat, et al., (2026) mengidentifikasi bahwa rendahnya tingkat pemahaman (literasi) digital serta terbatasnya akses pada infrastruktur dan pembiayaan menjadi kendala utama penghambat transformasi UMKM. Sejalan dengan hal itu, Suroto (2023) merinci bahwa tantangan bagi UMKM mencakup mahalnya biaya investasi awal untuk pengadaan teknologi, rasa

kewalahan dalam mempelajari perangkat lunak baru, hingga munculnya kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data pelanggan. Akibat dari rendahnya literasi dan keterbatasan anggaran ini, UMKM pada akhirnya juga kehilangan kesempatan berharga untuk berkolaborasi dan membangun kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi maupun ekosistem e-commerce besar.

Strategi mengurangi kesenjangan

Strategi mendasar untuk mengurangi kesenjangan digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah dengan meningkatkan kapasitas adaptif sumber daya manusia melalui pelatihan literasi digital yang terstruktur dan pendampingan partisipatif. Mengingat banyak pelaku UMKM di daerah pedesaan memiliki keterbatasan finansial, inovasi pendampingan berbasis teknologi rendah biaya (*low-cost technology*) menjadi solusi yang sangat esensial. Melalui pendekatan ini, UMKM diarahkan untuk memanfaatkan alat-alat yang terjangkau, seperti aplikasi media sosial untuk promosi dan perangkat lunak manajemen bisnis berbasis ponsel pintar untuk pengelolaan stok dan keuangan. Keterlibatan aktif pelaku usaha dalam proses pembelajaran teknis di lapangan terbukti mampu membuat mereka menguasai teknologi dan memetik manfaat efisiensi operasional tanpa harus melakukan investasi perangkat keras yang mahal (Suarni et al., 2024). Selain penguatan dari sisi internal, pendekatan inovasi terbuka (*open innovation*) melalui kolaborasi dengan platform digital eksternal merupakan strategi krusial untuk mempercepat transformasi UMKM. Pelaku usaha didorong untuk membangun kemitraan strategis dengan ekosistem e-commerce besar maupun perusahaan penyedia teknologi finansial (*fintech*). Kerja sama dengan platform e-commerce memberikan jalan pintas bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasarnya ke tingkat nasional hingga internasional. Sementara itu, pemanfaatan *fintech* tidak hanya memudahkan tata kelola transaksi pembayaran, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan mikro dengan bunga yang lebih rendah, sekaligus memungkinkan UMKM melahirkan inovasi produk yang lebih relevan dengan permintaan pasar modern (Sitompul et al., 2025). Pada tataran struktural dan makro, kelancaran strategi mengatasi kesenjangan digital sangat bergantung pada intervensi dan pembangunan ekosistem oleh pemerintah. Percepatan pembangunan infrastruktur digital secara merata, seperti perluasan jaringan internet ke desa-desa terpencil, merupakan prasyarat mutlak agar UMKM di wilayah pelosok

memiliki kemampuan dasar untuk bersaing secara daring. Lebih dari itu, pemerintah dituntut untuk merumuskan regulasi yang melindungi dan meringankan beban UMKM dalam fase transisi digital. Kebijakan afirmatif seperti pemberian insentif pajak e-commerce serta penyediaan payung hukum yang menjamin keamanan data transaksi elektronik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk bertransformasi (Sitompul et al., 2025). Secara keseluruhan, integrasi antara pendampingan teknologi tepat guna di akar rumput, kolaborasi dengan ekosistem platform digital, dan dukungan infrastruktur pemerintah akan bermuara pada peningkatan kinerja bisnis yang terukur. Bukti empiris dari pendampingan partisipatif menunjukkan adanya lonjakan efektivitas pada kecepatan respons terhadap pelanggan, optimasi harga, ketepatan pengelolaan inventaris stok, serta efektivitas promosi UMKM. Pada akhirnya, sinergi lintas sektor yang berkelanjutan ini tidak hanya sukses menjembatani kesenjangan digital, tetapi juga menjamin daya saing, perluasan pasar, dan resiliensi bisnis UMKM Indonesia di tengah ketatnya persaingan ekonomi global (Sitompul et al., 2025; Sumarni et al., 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian literatur ini menyimpulkan bahwa kesenjangan digital pada UMKM bersifat multidimensi dan terwujud dalam empat bentuk, yaitu kesenjangan akses materi, motivasi, keterampilan, dan penggunaan. Di antara keempatnya, keterampilan dan penggunaan teknologi untuk keperluan produktif paling menentukan produktivitas usaha, sedangkan kepemilikan perangkat dan motivasi dasar saja berpengaruh lemah. Kesenjangan tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi operasional, sempitnya jangkauan pasar, ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen, dan hilangnya peluang kemitraan strategis. Dampak ini berakar pada rendahnya literasi digital serta terbatasnya infrastruktur dan pembiayaan. Strategi untuk mengurangi kesenjangan mencakup pelatihan literasi digital dan pendampingan partisipatif berbasis teknologi berbiaya rendah, kolaborasi dengan platform *e-commerce* dan *fintech* melalui pendekatan inovasi terbuka, serta dukungan pemerintah berupa pemerataan infrastruktur digital, insentif, dan regulasi yang melindungi UMKM.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pelaku UMKM disarankan meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan internet untuk keperluan operasional usaha, tidak hanya untuk

media sosial dan hiburan. Pemerintah disarankan mempercepat pemerataan infrastruktur digital hingga ke wilayah terpencil serta menyediakan insentif dan perlindungan data transaksi elektronik. Akademisi, penyedia platform digital, dan generasi muda disarankan memperluas pendampingan yang bersifat teknis sekaligus edukatif bagi pelaku UMKM. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya bersandar pada data sekunder dari sejumlah artikel terpilih sehingga temuannya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh UMKM di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan menguji temuan ini secara empiris melalui survei atau studi lapangan pada berbagai sektor dan wilayah, termasuk membandingkan UMKM perkotaan dan perdesaan, serta menggunakan tinjauan literatur sistematis dengan cakupan sumber yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Hutabarat, W. B., Laia, S. R. A., Daole, A. S. A., Lumban Gaol, D. W., & Simanungkalit, J. B. (2026). Studi literatur: Peran UMKM di era digital dalam mendorong pembangunan ekonomi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(3)
- Lukas, E. N., & Hasudungan, A. (2024). The impact of the digital divide on MSMEs' productivity in Indonesia. *International Research Journal of Business Studies*, 16(3), 241–252.
- Morisson, B., & Fikri, A. A. H. S. (2025). Digitalisasi UMKM sebagai strategi meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. *EBISNIS (Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis)*, 18(1), 289–299.
- Pramesty, F. A. (2024). Kesenjangan digital dan peran generasi muda dalam penguatan transformasi digital untuk pemenuhan legalitas UMKM. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 9(1)
- Saragih, J. F. L., Faradilla, A. J., Nasution, R. A., Tafonao, D. F. A., Pitaloka, D., Amelia, B., Munawaroh, & Dongoran, D. (2024). Menutup kesenjangan digital: Studi tentang meningkatkan kehidupan UMKM melalui literasi digital. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1788–1795.
- Sitompul, P. S., Sari, M. M., Lumban Gaol, C. M. B., & Harahap, L. M. (2025). Transformasi digital UMKM Indonesia: Tantangan dan strategi adaptasi di era ekonomi digital. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, 2(2), 09–18.
- Suarni, T., Harto, B., Yulistiati, G., Nurhajati, Y., & Vandayani, P. (2024). Inovasi pendampingan teknologi rendah biaya, transformasi digital untuk mengatasi kesenjangan digital UMKM di Desa Cibogo Lembang. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*, 8(3), 46–55
- Suroto. (2023). Dampak digitalisasi terhadap UMKM di Kota Jambi: Studi deskriptif kualitatif tentang persepsi para pakar dan pelaku usaha UMKM. *Khazanah Intelektual*, 7(3)
- Syafiqah, N. A., Khairunissa, N., Hutabarat, D. A. P., & Hayati, F. (2025). Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 1649–1656.